

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH BANTEN LAMA KOTA SERANG

Pakhudin, Arenawati, Titi Stiawati

Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

Abstract

The Banten Lama area of Serang City is a cultural heritage area in the heritage complex of the Sultanate of Banten, consisting of various kinds of historical relics that are tourist attractions. The purpose of this study is to describe and analyze the obstacles to the implementation of tourism development policies in Banten Lama Serang City. This research uses a qualitative case study approach with a descriptive method. The data analysis technique used is the Miles & Huberman model. The results of this study indicate that the implementation of the Banten Lama Regional Tourism Development Policy, Serang City is still not optimal because communication and coordination between Banten Lama tourism institutions have not been effective, namely regarding the management of tourism potential and income from the tourism sector, limited quantity and competence of resources in tourism management in Indonesia. deal with collaborative mechanisms between tourism institutions, the attitude of implementing the tendency (disposition) fully supports tourism development policies but involves a complex bureaucracy, the tendency towards policies also automatically becomes diverse, plans to establish a special management institution for Banten Lama to have its own organizational structure formed by the Government Regions and Stakeholders have not yet been formed.

Abstrak

Kawasan Banten Lama Kota Serang merupakan suatu kawasan cagar budaya di kompleks peninggalan Kesultanan Banten, terdiri atas berbagai macam peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik wisata. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan dan menganalisis hambatan – hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang masih belum maksimal karena komunikasi dan koordinasi antar kelembagaan pariwisata Banten Lama belum efektif yaitu mengenai pengelolaan potensi wisata dan pendapatan dari sektor pariwisata, keterbatasan kuantitas dan kompetensi sumber daya dalam pengelolaan pariwisata di siasati dengan mekanisme secara *kolaboratif* antar kelembagaan pariwisata, sikap pelaksana kecenderungan (disposisi) mendukung penuh kebijakan pengembangan pariwisata tetapi melibatkan birokrasi yang kompleks kecenderungan terhadap kebijakan juga otomatis menjadi beragam, rencana pembentukan kelembagaan pengelolaan khusus Banten Lama agar memiliki struktur organisasi tersendiri yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah dan Steakholder sampai sekarang belum terbentuk.

Kata Kunci: Pengembangan, Pariwisata, Banten Lama, Implementasi Kebijakan

Keywords:

Development, Tourism, Banten Lama, Policy Implementation

Article history:

Submission December 9 2021

Revision June 03 2022

Accepted June 21 2022

Published June 30 2022

***Corresponding author**

Email:

pakhudin@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah sector prioritas dalam pembangunan di Indonesia saat ini karena memiliki prospek yang sangat besar untuk dikembangkan (Pitana & Gayatri, 2005:54), secara khusus bagi daerah – daerah di Indonesia yang menyimpan potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan beragam yang layak untuk di jadikan sebagai daya tarik wisata. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam pembentukan tempat wisata seperti penambahan sarana prasarana ataupun hanya sekedar membenahi sarana yang sudah ada supaya menjadi lebih baik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menarik wisatawan, dan supaya para wisatawan yang datang tidak merasa bosan bila berwisata di tempat wisata tersebut.

Bahwa sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industry pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih ini yang mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara juga terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang di tunjukan dalam tabel I.

Tabel 1. Jumlah Wisman yang datang ke Indonesia Tahun 2016-2019 (Dalam jutaan)

No	Tahun	Jumlah
1	2016	12,02
2	2017	14,04
3	2018	15,81
4	2019	16,11

Sumber data: Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024

Data di atas memberikan gambaran bahwa wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi di sektor pariwisata. Tempat-tempat wisata di Indonesia memiliki daya tarik yang kuat terhadap wisatawan, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religi. Pelaksanakan pengembangan pariwisata Banten Lama dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, stakeholder dan masyarakat dalam bentuk tindakan atau kegiatan pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Van Mater dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Nawawi, 2009:131) sedangkan implementasi menurut pandangan Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur (Nawawi, 2009:138).

Pengembangan pariwisata Banten Lama diawali dengan revitalisasi dan penataan kawasan Cagar Budaya Banten Lama Kota Serang dengan dilakukan penandatanganan

memorandum of understanding (MOU) Nomor : 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017 dan 516/MOU.24-HUK-2017 pada tanggal 4 Oktober 2017 oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan maksud sebagai landasan bagi para pihak dalam melakukan kerjasama guna merevitalisasi kawasan keraton Kesultanan Banten untuk melestarikan cagar budaya di provinsi Banten. Hal ini memerlukan pelibatan secara intensif dari berbagai stakeholder walaupun tentu saja mengandung implikasi yang cenderung kompleks dan tidak mudah pada tataran praktis. Kemudian di keluarkannya Keputusan Gubernur No. 437/Kep. 160 – HUK/2018 tentang Peta Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kasultanan (Banten Lama) dengan luas keseluruhan kawasan cagar budaya kasultanan Banten 926,94 Ha terdiri kawasan Inti 172,58 Ha dan Kawasan Penyangga seluas 754,34 Ha yang terletak di 4 kelurahan di Kecamatan Kasemen Kota Serang dan 2 Desa di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Pengembangan pariwisata Banten Lama dalam Peraturan Daerah Kota Serang No. 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Perda tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pariwisata Banten Lama memiliki daya tarik wisata agama, Sejarah (arkeologi), Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan. Pada Kawasan Banten Lama Kota Serang terdapat banyak cagar budaya yaitu Masjid Agung Banten Lama, Istana Keraton Surosowan, Benteng Speelwijk, Vihara Klenteng Avalokitesvara, Masjid Pecinan, Jembatan Rantai, Pelabuhan Karangantu dan Istana Keraton Kaibon. Dalam perkembangannya, pengembangan pariwisata yang di lakukan mulai mengembangkan hasil. Tingkat kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Kota Serang mulai meningkat seperti yang di gambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara Kota Serang

No	Wisatawan	Tahun			Perkembangan (%)	Perkembangan (%)
		2017	2018	2019		
1	Wisatawan Mancanegara	1,091	1,215	11	631	- 48.07
2	Wisatawan Domestik	75,641	2,208,570	2,820	12,789,777	479.10
	Jumlah	76,732	2,209,785	2,780	12,790,408	478.81

Sumber: Data Statistik Kota Serang Tahun 2020.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata – rata kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar 2.780 persen sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 naik sebesar 478.81 persen. Data tersebut

menunjukkan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama sejak 2017 berdampak cukup signifikan pada peningkatan jumlah kunjungan domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan pengamatan dan observasi, bahwa perkembangan pariwisata Banten Lama cukup menggembarakan, namun masih ada sejumlah permasalahan dalam pengembangan pariwisata daerah Banten Lama Kota Serang. Sejumlah permasalahan yang ada diantaranya adalah (1) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar kelembagaan kepariwisataan. (2) Masih belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat karena revitalisasi masih berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi masih minim dari segi kegiatan non fisik (3) belum terselesaikannya pembangunan kawasan penunjang wisata (KPW).

Praktek kebijakan pengembangan pariwisata telah menjadi bahasan dalam sejumlah penelitian. Studi yang dilakukan oleh Jupir (2013) yang meneliti implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian Jupir tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal, berdasarkan hasil penelitian tersebut, belum optimal karena faktor-faktor penunjangnya tidak disediakan dengan baik, mulai dari sumber daya pendukung hingga struktur birokrasi. Sejumlah hasil yang mengemuka dalam penelitian tersebut adalah implementasi menggunakan pendekatan top down, minimnya ruang partisipasi publik, promosi kurang memadai, dan kinerja pelaksana kebijakan yang kurang optimal.

Studi berikutnya di lakukan oleh Eri Irawan (2015) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Pada Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan pendekatan analisis deskriptif. Dijelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi belum berjalan optimal. Faktor yang bisa menghambat kebijakan pengembangan pariwisata banyuwangi yaitu Kurang sinergi (Komunikasi) antar pemangku kepentingan sehingga dalam beberapa konteks, implementasi kebijakan justru menghasilkan perubahan yang negatif, Kompetensi pelaksana kebijakan masih kurang dalam menerjemahkan garis besar kebijakan pengembangan pariwisata, Partisipasi masyarakat masih belum optimal karena pelaksana kebijakan belum melibatkan publik secara substantive.

Penelitian berikutnya dari Sri Nurhayati Qodriyatun (2018) tentang Implementasi kebijakan Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa. Penelitian dilakukan di tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan studi dokumen. Disparbud Kabupaten Jepara dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah telah melakukan promosi dan pengembangan kapasitas SDM pelaku wisata Karimunjawa. Namun permasalahan sampah, air bersih, kerusakan terumbu

karang, dan perubahan sosial budaya masyarakat muncul sebagai dampak dari pengembangan pariwisata di Karimunjawa. Oleh karenanya, pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum dapat dikatakan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dari Medlin Anggrayni Hura (2020) tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Soziona sudah berjalan dengan baik terkhusus variabel karakteristik pelaksana. Akan tetapi variabel yang belum optimal terkait dengan standar dan sasaran kebijakan yang tercapai, sumber daya finansial yang terbatas serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata. Komunikasi antarinstansi pelaksana sudah berjalan baik namun koordinasi belum maksimal karena masalah keterbatasan anggaran dan masalah sinkronisasi program antarinstansi yang di batasi oleh Tupoksi instansi di wilayah lain. Sikap pelaksana masih kurang tanggap melaksanakan tugasnya serta kondisi sosial, ekonomi dan politik masih belum optimal mendukung.

Dari berbagai penelitian tersebut, mayoritas mengkaji dampak dan factor penghambat dari implementasi kebijakan pariwisata sedangkan penelitian Jupir (2003) memfokuskan pada implementasi kebijakan pariwisata pada ke arifan lokal. Adapun penelitian ini menganalisa implememtasi kebijakan pariwisata secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis hambatan – hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama. Metode yang di gunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif yang menggambarkan isu – isu strategis mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama dan informan di peroleh dari kunjungan lapangan yang di lakukan dilokasi penelitian dimana di pilih secara *purposive* berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dari inventarisasi data primer yaitu pengamatan non partisipan dan wawancara mendalam (*dep interview*), sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi literatur dan dokumentasi mengenai data dokumen pemerintah, pemberitaan media cetak dan elektronik, buku – buku dan jurnal yang terkait implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Selanjutnya teknis analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data di lakukan dengan cara triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan mengadakan member check data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Komunikasi Antar Kelembagaan Kepariwisata Banten Lama

Saat ini revitalisasi dan penataan kawasan wisata cagar budaya Banten Lama melibatkan kerjasama untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah Banten Lama yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kota Serang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Selanjutnya di lakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU) Nomor : 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017 dan 516/MOU.24-HUK-2017 pada tanggal 4 Oktober 2017, dengan maksud sebagai landasan bagi para pihak dalam melakukan kerjasama guna merevitalisasi kawasan keraton Kesultanan Banten untuk melestarikan cagar budaya di Provinsi Banten dan bertujuan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang, melestarikan dan memelihara peninggalan Kawasan Keraton Kasultanan dan meningkatkan kualitas destinasi pariwisata. Oleh karena itu MOU tersebut menjadi media komunikasi dan sebagai pedoman strategis yang harus di taati oleh semua pihak dan memerlukan pelibatan secara intensif dari berbagai stakeholder dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama agar berjalan efektif.

Dalam berjalannya waktu kerjasama yang di lakukan kelembagaan Kepariwisata Banten Lama tidak berjalan efektif karena banyaknya keterlibatan birokrasi dalam pengembangan pariwisata Banten Lama karena mempunyai peran dan tanggung jawab masing - masing. PERKIM provinsi Banten sebagai koordinator penataan Banten Lama di bantu oleh Dinas terkait untuk melakukan penataan Masjid agung Banten Lama, Istana Keraton Surosowan, Benteng Speelwick, Vihara Klenteng Avalokiteswara, Mesjid Pecinan dan Keraton Kaibon. Kemudian Kota Serang melakukan penataan di terminal sukadiri dan Kawasan Penunjang Wisata sedangkan Kenadziran mengelola kawasan masjid agung Banten. Keterlibatan banyak stakeholder mengandung implikasi yang cenderung kompleks dan tidak mudah pada tataran praktis.

Transmisi berjalan dengan efektif karena Gubernur Banten dan Walikota Serang sebagai pemimpin birokrasi yang memandu arah kebijakan memaparkan maksud dan tujuan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama kepada dinas terkait. Faktor hierarkis dalam struktur birokrasi sebenarnya ikut memudahkan proses transmisi dalam implementasi kebijakan, karena ketika ada perintah atasan maka otomatis bawahan akan melaksanakan. Transmisi program dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti *Whatsapp Group* dan *Forum Group Discussion (FGD)* serta rapat - rapat, baik yang dilakukan antar pemerintah daerah maupun yang melibatkan kerja sama pihak eksternal birokrasi. Dari aspek kejelasan, terdapat permasalahan sehingga menimbulkan distorsi dan bahkan salah persepsi yang berujung pada resistensi terhadap kebijakan (perubahan yang tidak dikehendaki), seperti adanya informasi dari masyarakat bahwa revitalisasi dan penataan Banten Lama yang di lakukan pemerintah daerah untuk mengambil alih

asset dan pengelolaan Banten Lama yang dulunya di kelola oleh kenadziran (Masyarakat) dan komunikasi kebijakan pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan kurang berjalan secara konsisten terutama permasalahan pengelolaan dan rencana pembentukan kelembagaan khusus yang mengelola kawasan wisata Banten Lama yaitu dari lingkungan antar birokrasi maupun pemangku kepentingan, oleh karena itu perlu di lakukan komunikasi kebijakan secara terus -menerus.

Kondisi tersebut di atas, berkaitan pula dengan faktor struktur organisasi yang bisa terfragmentasi karena kepentingan yang dibawa berbenturan atau terganggu dengan perubahan kebijakan yang ada. Dengan fakta yang ada tersebut, faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama masih menemui banyak kendala, terutama pada faktor kejelasan. Faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi adalah kompleksitas kebijakan dan tidak tercapainya konsensus untuk mencapai tujuan kebijakan.

“Dinas PERKIM Provinsi Banten merupakan koordinator dalam melakukan penataan cagar budaya Banten Lama, di bantu oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, ketertiban dan kebersihan di kawasan Zona Penyangga dan pengembangan cagar budaya Banten Lama. Dalam berjalannya waktu kerjasama yang dilakukan tidak efektif karena secara struktural sejajar antara Dinas PERKIM dengan OPD terkait di Provinsi Banten. Belum lagi Koordinasi dengan Kota Serang, BPCB Banten dan kenadziran (masyarakat) yang kurang berjalan efektif. Sebenarnya ada tugas dan tanggung jawab masing – masing tetapi ujung – ujungnya kembali ke Dinas PERKIM. (Informasi wawancara dengan Sekretaris Dinas PERKIM Provinsi Banten, Tanggal 9 November 2021)

Faktor Sumberdaya Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Banten Lama.

- Staf.

Secara kelembagaan pariwisata, Pemerintah Daerah Kota Serang kurang diperkuat dengan staf – staf yang sesuai dengan bidang kepariwisataan karena kelembagaan pariwisata masih di gabung dengan Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kota Serang, sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Serang.

Dari sisi size pelaksana program kebijakan, sebenarnya belum mencukupi jika dibebankan hanya pada Disparpora Kota Serang saja. Jumlah staf pelaksana relatif terbatas karena staff bidang pariwisata hanya 8 orang dengan cakupan kerja yang begitu luas. Meski demikian, kuantitas yang terbatas untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama disiasati dengan pembagian peran bersama Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Banten dan Kota Serang membagi peran sesuai tujuan dan tanggung jawabnya masing – masing dalam pengembangan pariwisata

Banten Lama yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait. Jika terkait penataan dan pengelolaan di Zona Penyangga dan pengembangan Banten Lama di lakukan Provinsi Banten dengan koordinator Dinas PERKIM sedangkan Penataan dan pengelolaan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) di lakukan oleh Kota Serang. Kemudian dari BPCB Banten mengelola pelestarian cagar budayanya. Untuk pengelolaan masjid Banten Lama dan makam keluarga Sultan Banten di kelola oleh kenadziran. Maka berkaitan dengan kebijakan pengembangan wisata Banten Lama di butuhkan sinergi antara pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, BPCB Banten, dan Kenadziran sehingga program kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama dapat berjalan dengan baik.

Dari sisi kompetensi pelaksana kebijakan, terdapat permasalahan pada kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan, terutama dari sisi konsep makro kebijakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kota Serang. Masih banyak yang belum memahami tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, inkompetensi terjadi karena minimnya latar belakang pendidikan staf tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya saat ini. Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Kota Serang berupaya mempercepat transformasi kompetensi dengan melakukan pelatihan atau study Banding tentang Konsep wisata ke daerah lain.

- **Informasi**

Informasi terkait tujuan kebijakan pariwisata sebenarnya sudah cukup jelas yaitu Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dan keputusan - keputusan dalam rapat yang dipimpin oleh policy maker telah disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada, seperti grup di aplikasi pesan instan dan rapat – rapat koordinasi kepada brirokrasi terkait dan masyarakat dalam melakukan pengembangan pariwisata Banten Lama. Namun, untuk implementasinya memang berkaitan dengan masalah kompentensi dan kepentingan birokrasi pelaksana. Dalam penelitian ditemukan permasalahan yaitu tidak tereksekusinya secara optimal kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sehingga menimbulkan konflik social antara kenadziran dengan satgas Dinas PERKIM Provinsi Banten, Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dengan Satgas Dinas PERKIM karena berjualan di dalam Zona Inti, Penyangga dan pengembangan yang menyebabkan banyak sampah sehingga masih terkesan kumuh dan Dinas perhubungan dengan masyarakat local yang mengelola parkir liar dengan tarif tidak sesuai ketentuan.

- **Wewenang**

Kelembagaan Kepariwisata Banten Lama dalam mengimplementasi Kebijakan pengembangan pariwisata mempunyai kewenangan masing –masing sesuai peran dan tanggung jawabnya karena pengelolaan kawasan wisata Banten Lama di lakukan dengan

mekanisme Colaboratif, mensyaratkan setiap pemerintah daerah mempunyai kesamaan dalam pemahaman tentang bagaimana formulasi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yaitu Provinsi Banten dengan melakukan revitalisasi dan penataan di kawasan inti dengan coordinator Dinas PERKIM Sedangkan Kota Serang melakukan pengembangan pariwisata dengan membangun dan menata kawasan penunjang wisata (KPW) dan BPCB Banten melakukan pelestarian cagar budaya. Kemudian Kenadziran mengatur para peziarah yang menuju ke tempat makam keluarga sultan dan masjid agung Banten Lama.

- **Fasilitas**

Dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama sudah berjalan cukup baik yang dulunya terkesan kumuh tetapi sekarang sudah tertata dengan baik. Dukungan pendanaan dari bantuan keuangan Provinsi Banten ke Kota Serang sebesar 20 Milyar pada tahun 2016 untuk membangun dan menata kawasan penunjang wisata, Provinsi Banten melalui APBD pada tahun 2017 menganggarkan sebesar Rp. 85.561.600.000 dan pada tahun 2018 merencanakan anggaran sebesar Rp. 175.048.631.200, APBD Kota Serang 14 Milyar tahun 2019 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun dukungan dari APBN di berikan melalui BPCB Banten untuk program pelestarian cagar budaya. Adapun dukungan fasilitas fisik yaitu diwujudkan dalam berbagai tempat yang menjadi penunjang destinasi wisata dengan memperhatikan sejumlah aspek berikut:

Atraksi dan daya tarik wisata

- **Kebudayaan**

Menampilkan atraksi wisata Peninggalan budaya dengan karakter unsur local yaitu Debus, Patingtung, Terbang Gede dan Panjang Mulud.

- **Agama**

Kawasan Banten Lama merupakan tinggalan masa Kesultanan Banten yang merupakan salah satu kesultanan Islam besar di Indonesia dengan menyelenggarakan kegiatan hari besar islam yaitu Maulid Nabi dengan tradisi Panjang Mulud, Tahun baru Islam dan Kegiatan bulan suci Ramadhan dan Peninggalan budaya berupa Masjid Agung Banten dipergunakan sebagai pusat kegiatan peribadatan dan berpotensi dikembangkan sebagai wisata religi atau Ziarah

Amenitas (akomodasi)

Kawasan wisata Banten Lama juga didukung fasilitas informasi & pelayanan pariwisata, kemudian penataan di keraton kaibon, Benteng Surosowan, Plaza Masjid Amphotheater, Benteng Spelwijk, Masjid Agung, Masjid Pecinan dan Kawasan Wisata Banten Lama yang di lakukan Dinas PERKIM Provinsi Banten sedangkan di kawasan penunjang wisata terdapat Tourism Information Center (TIC), Kios dan Parkir tetapi belum difungsikan oleh pemerintah Kota Serang. Sedangkan fasilitas umum lainnya

yang mendukung pariwisata Cagar Budaya Banten Lama yaitu Sarana peribadatan, terminal, toilet umum dan kesehatan di puskesmas Kecamatan Kasemen. Kemudian pusat oleh – oleh dan cinderamata Khas Banten

Akseibilitas

Pembangunan jalan di lakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten yaitu pembangunan jalan Lopang – Banten Lama, jalan Banten Lama – Tonjong dan Tonjong - Keramatwatu di lakukan pelebaran jalan. Dari arah Sumatra dengan transportasi laut dapat melalui Pelabuhan Merak, transportasi udara melalui bandara soekarno hatta dan jalur darat dari wilayah timur melalui Kota Serang sedangkan dari wilayah barat dapat melalui Kabupaten Serang. Kemudian dari transportasi kereta api dapat melalui stasiun karangantu.

Infrastruktur pendukung

Adapun prasarana umum pendukung pariwisata Cagar Budaya Banten Lama Yaitu jaringan telekomunikasi hampir semua Provider, drainase baik yang terbuka & tertutup, sarana pengelolaan sampah dan pemasangan penerangan jalan umum dan rambu – rambu lalu lintas.

Fasilitas pendukung (Ancillary Services)

Untuk menunjang pengembangan pariwisata diperlukan organisasi-organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan. Di kawasan wisata Banten Lama baru ada beberapa organisasi kepariwisataan seperti: Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Maulana Yusuf dan KI AMUK, Pengelola HomeStay dan paguyuban Fotografer & Bingkai.

Kelembagaan dan sumber daya manusia

Pengelolaan kawasan Banten Lama Kota Serang dilakukan oleh kelembagaan kepariwisataan yang pengelolannya secara kolaboratif terdiri dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, BPCB Banten, dan Kenadziran (masyarakat) yang mempunyai tugas, peran dan tanggung jawabnya masing - masing. Pembentukan kelembagaan khusus untuk mengelola wisata Banten Lama sampai sekarang belum terbentuk.

Meski pembangunan fasilitas cukup marak tetapi belum terdapat sinergi yang baik dengan masyarakat, sehingga perilaku masyarakat belum semuanya berubah sesuai yang diharapkan. Berdasarkan temuan di lapangan, para pedagang kreatif lapangan (PKL) yang berjualan di terminal ciputri yang masuk wilayah Zona penyangga dan pengembangan, justru menentang dipindahkan ke kawasan penunjang wisata yang sudah di buat kios dan tanpa di kenakan biaya sewa dengan alasan bisa menurunkan potensi pendapatan mereka karena lokasinya tidak strategis. Kemudian kendaraan pengunjung masih masuk ke Zona Penyangga dan pengembangan karena masih adanya

fasilitas parkir liar di dalam Zona tersebut. Kondisi tersebut menghasilkan tekanan pihak luar terhadap organisasi pelaksana (fragmentasi) yang dapat menimbulkan gangguan atau kendala serius yang bisa mengganggu implementasi kebijakan, sehingga membutuhkan solusi yang terintegrasi. Dalam kerangka *Hogwood dan Gunn* (dalam Wahab, 2004: 71-78) sudah disebutkan, implementasi bisa berhasil jika kondisi eksternal organisasi pelaksana tidak menimbulkan gangguan atau kendala serius yang bisa mengganggu implementasi kebijakan.

Faktor Disposisi (Kecenderungan) Pelaksana dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Pariwisata.

Pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata adalah mendukung penuh untuk kemajuan daerah karena pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai seorang birokrat. Para pelaksana dalam kebijakan pariwisata cukup aktif mengkoordinasikan semua hal teknis terkait implementasi kebijakan yang melibatkan organisasi pelaksana lainnya. Meski demikian, karena melibatkan struktur organisasi atau birokrasi pelaksana yang kompleks, kecenderungan terhadap kebijakan juga otomatis menjadi beragam. Terdapat organisasi pelaksana yang dalam penelitian ini bisa dikatakan mengambil kecenderungan yang tidak peduli atau masuk dalam zona ketidak acuan. Dalam penelitian ini, penulis mengategorikan kecenderungan resisten setelah melakukan wawancara sebagai berikut:

“Dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang, Parkir liar dan peminta - minta di kawasan inti wisata Banten Lama merupakan kewenangan Provinsi Banten sedangkan Kewenangan Kota Serang pada Kawasan Penunjang Wisata dan terminal sukadiri. Apabila akan melakukan penertiban, biasanya dari Dinas Satpol PP dan Perhubungan Provinsi Banten meminta bantuan ke Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Serang untuk melakukan penertiban karena asset Banten Lama belum diserahkan Ke Kota Serang. (Informasi wawancara dengan Kepala UPT Parkir Kota Serang Bpk. Umar, Tanggal 23 November 2021).

Dalam hal tersebut dia atas, Pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten sudah memahami kultur birokrasi semacam itu dan telah melakukan antisipasi. Selain melakukan komunikasi secara berkelanjutan, Walikota Serang menugaskan asisten daerah (ASDA 1) yang membidangi pemerintahan untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan sedangkan dari provinsi Banten di wakili oleh Kepala Dinas PERKIM. Adapun respons pelaksana atas implementasi kebijakan tentu sangat bergantung pada kecenderungan mereka pada kebijakan yang dimaksud. Pelaksana yang mempunyai kecenderungan mendukung akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Sebaliknya, pelaksana yang mempunyai kecenderungan untuk resisten (baik secara

terbuka maupun pasif) akan memilih mengambil jarak dengan implementasi kebijakan. Resistensi timbul karena belum dilibatkannya publik secara penuh dan substantif dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata karena masih menganut kebijakan Top Down. Akibatnya ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas.

Dalam penelitian ini ditemukan, publik memang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata, namun belum tahap substantif secara penuh dan nyata. Publik lokal bukan hanya jadi penonton, tapi juga berkreasi menjadi pelaksana dan pelaku usaha jasa pariwisata mempunyai kesadaran penuh sebagai pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata. Kesadaran masyarakat harus terepresentasi dalam kecenderungan yang mendukung kebijakan pengembangan pariwisata, seperti bersikap ramah terhadap wisatawan, tidak melakukan hal yang kontraproduktif dengan pengembangan wisata, dan mampu memanfaatkan potensi wisata untuk kegiatan ekonomi produktif. Masih terdapat perlakuan kurang mengembirakan kepada wisatawan yaitu mengenai masih banyaknya parkir liar dengan tarif yang tidak sesuai ketentuan, Kotak amal yang masih terkesan memaksa kepada para pengunjung yang ingin berziarah dan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya oleh para pedagang dan pengunjung sehingga masih terkesan kumuh. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kecenderungan sebagian warga belum mendukung kebijakan pengembangan pariwisata.

Struktur Birokrasi untuk Mengelola Pariwisata Banten Lama

Dalam pengelolaan pariwisata Banten Lama, belum ada *Standar Operational Prosedur* (SOP) yang baku untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Undang – Undang dan Peraturan Daerah hanya menjadi panduan umum tentang garis besar kebijakan. Padahal SOP berguna untuk menyeragamkan tindakan para pelaksana sehingga menjamin efektivitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Meski tidak ada SOP secara formal, acuan pelaksanaan operasional dalam kebijakan pariwisata ada dalam berbagai dokumen hasil koordinasi/rapat untuk implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama melibatkan banyak pihak yaitu Provinsi Banten melalui Dinas Perkim yang melakukan penataan dan pengelola kawasan Banten Lama, Pemerintah Kota Serang yang di Supervisi (ASDA 1), dan Kenadziran. Dalam konteks tersebut, penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yang dari semua pemangku kepentingan harus patuh pada hasil evaluasi serta menindaklanjuti semua rekomendasinya.

Dalam memperkuat struktur birokrasi, dalam penelitian diketahui tentang urgensi untuk membuat Badan Khusus untuk mengelola pariwisata Banten Lama sesuai amanat dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 97 yang berisikan bahwa pada sebuah Kawasan Cagar Budaya diperlukannya sebuah badan untuk mengelola, yang di dalamnya terdapat unsur dari

pemerintah, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi pariwisata Banten Lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi. Pengelolaan Strategis Pariwisata sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melakukan kajian mengenai pembentukan kelembagaan dan tata kelola kawasan wisata Banten Lama yaitu Kelembagaan kawasan Kota Lama Semarang dan Kota Tua Jakarta.” (Informasi wawancara dengan Kasi Pengelolaan Strategis Pariwisata Prov. Banten Bpk. Eri Sujatmika, Tanggal 20 November 2021)

Meski penting, pelibatan semakin banyak organisasi pelaksana lain (para pemangku kepentingan) juga berisiko menyulitkan implementasi kebijakan. *Hogwood dan Gunn* (dalam Wahab, 2004: 71-78) menyatakan salah satu syarat implementasi kebijakan bisa lancar adalah jika hubungan ketergantungan organisasi pelaksana dengan pihak lain tidak kompleks. Apabila implementasi tersebut bergantung pada semakin banyak aktor/organisasi pelaksana dengan segala kepentingan yang dibawanya, pelaksanaan kebijakan akan semakin sulit dilakukan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Banten Lama Kota Serang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pariwisata dengan merevitalisasi dan penataan di Zona penyangga dan pengembangan kawasan wisata Banten Lama yang di lakukan oleh Provinsi Banten yaitu penataan area masjid Banten, Plaza Masjid, Plaza Museum, Taman Benteng Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spelwijk, Kawasan Masjid pecinan secara fisik sudah banyak mengalami perubahan dan masih proses pembuatan Kanal dan pembangunan Baitul Quran. Sedangkan Pemerintahan Kota Serang fokus pada penataan dan pembangunan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti lahan parkir terpadu, pembuatan kios (PKL), toilet, mushola dan *Tourism Informasi Centre (TIC)*. Di dalam implementasi, terdapat sejumlah faktor yang bisa menghambat kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama, yaitu:
 - a. Komunikasi antara kelembagaan kepariwisataan Banten Lama belum efektif karena berbagai macam kepentingan masing – masing kelembagaan pariwisata yaitu mengenai pengelolaan, potensi & pembagian pendapatan dari sektor pariwisata Banten Lama, Pengelolaan sumbangan kotak amal, dan pengaruh dukungan kepentingan politik.

- b. Aspek kejelasan informasi terdapat permasalahan sehingga menimbulkan distorsi dan bahkan salah persepsi yang berujung pada resistensi terhadap kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa revitalisasi dan penataan Banten Lama yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengambil alih asset dan pengelolaan Banten Lama yang dulunya di kelola oleh kenadziran (Masyarakat).
 - c. Kelembagaan pariwisata Kota Serang secara kualitas dan kuantitas kurang diperkuat dengan staf – staf yang sesuai dengan bidang kepariwisataan karena kelembagaan pariwisata masih bagian dari Dinas Pariwisata pemuda dan Olah Raga (Diparpora).
 - d. Terjadi kesenjangan meskipun kecil tetapi cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama karena tidak tereksekusinya secara optimal kebijakan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Kurang sinergi dan komitmen yang tinggi dari para pejabat publik (Gubernur dan Bupati) karena pengelolaan Banten lama dengan mekanisme kolaboratif, mensyaratkan setiap pemerintah daerah mempunyai kesamaan dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
 - f. Melibatkan struktur organisasi atau birokrasi pelaksana yang kompleks, kecenderungan terhadap kebijakan juga otomatis menjadi beragam. Terdapat organisasi pelaksana yang bisa dikatakan mengambil kecenderungan yang tidak peduli atau ketidak acuhan karena keterbatasan wilayah yang bukan kewenangannya.
 - g. Pengembangan pariwisata Banten Lama belum memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) yang baku. Undang – undang dan Peraturan Daerah hanya menjadi panduan umum tentang garis besar kebijakan.
 - h. Rencana pembentukan kelembagaan pengelolaan khusus Banten Lama yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan stakeholder sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai konsep kelembagaan yang akan disepakati.
- 2) Meski terdapat sejumlah faktor penghambat, terdapat faktor-faktor pendukung yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama, yaitu:
- a. Komunikasi dan koordinasi pada organisasi pelaksana kebijakan dilindungi internal pemerintahan (Provinsi Banten, Kota Serang dan BPCB Banten) dalam pengembangan Pariwisata Banten Lama berjalan dengan efektif karena koordinasi langsung di bawah Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) dan Kepala (BPCB) Banten.
 - b. Fasilitas atau dukungan pendanaan untuk pengembangan pariwisata Banten Lama didapatkan dari APBD Kota Serang & bantuan keuangan dari pemerintah provinsi

Banten, APBD Provinsi Banten dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kementerian perindustrian & perdagangan dan Kementerian Pariwisata.

- c. Komitmen para pemimpin politik di daerah untuk mengembangkan pariwisata sangat tinggi, sehingga bisa menggerakkan perangkat birokrasi sebagai sumber kekuasaan dan finansial untuk memacu berbagai program pariwisata. Koordinasi vertikal juga dilakukan oleh Kota Serang dengan melobi Kementerian Pariwisata & ekonomi kreatif, KemPerindag dan Kemdikbudristek agar ikut mendukung pengembangan pariwisata Banten Lama.
- d. Pelibatan banyak organisasi pelaksana lain dalam pengembangan pariwisata Banten Lama, bagi para pemangku kepentingan sangat membantu.

Berdasarkan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama Kota Serang, maka peneliti memberikan saran dari hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dibutuhkan keberanian dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama baik di tingkat Provinsi Banten (Gubernur) maupun di Kota Serang (Walikota).
- 2) Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam pengembangan pariwisata daerah agar menurunkan ego sektoral, sehingga koordinasi dan komunikasi berjalan efektif.
- 3) Menyelesaikan pembangunan kawasan penunjang wisata (KPW) sehingga dapat difungsikan untuk penataan pedagang kreatif Lapangan (PKL), Pusat makanan oleh – oleh, kuliner & cinderamata khas Banten dan pusat parkir para pengunjung wisata Banten Lama.
- 4) Sinkronisasi dan sinergi antar kelembagaan kepariwisataan dalam menjalankan kebijakan penataan pariwisata Banten Lama dengan mengarahkan kunjungan wisatawan ke kawasan penunjang wisata, agar para peziarah atau wisatawan memarkirkan kendarannya ke kawasan penunjang wisata sehingga tidak ada lagi kendaraan yang parkir dan pedagang di Zona inti, penyangga dan pengembangan.
- 5) Para pemangku kepentingan harus duduk bersama dalam rencana Pembentukan kelembagaan pengelolaan pariwisata Banten Lama karena selama ini hasil pertemuan pembentukan kelembagaan pariwisata yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan belum menemui titik terang.

REFERENSI

Sumber buku

- A, Yoeti, Oka. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
- Andi, Mappi, Sammeng. 2001. Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka.
- Creswell, John W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi
- Fuad dan Nugroho. 2012. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Serang: Fisip Untirta Press.
- J.A. Muljadi. 2012. Pariwisata dan Perjalanan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mangkuprawira, Sjafrri. 2004. Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pitana dan Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahab. 1998. Progress in Tourism and Hospitality Research: Tourism development in Egypt: Competitive strategies and implications
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Artikel Jurnal Penelitian

- Eri Eriawan. 2015. *Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Banyuwangi*: UNAIR
- Jupir, Maksimilianus Maris, 2013. Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal: Studi di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol.1, No.1, Januari, 2013.

Sri Nurhayati Qodriyatun, 2018 Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di karimunjawa: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Peraturan dan Dokumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pola Parkir
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 Kota Serang.
Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang No. 430/MOU.4-HUK/2017, No. 430/718-Setda/2017 dan No. 516/MOU.24-HUK/2017 Tentang Revitalisasi Kawasan Keraton Kasultanan Banten.

Website

(<https://news.detik.com/berita/d-4585232/duh-kawasan-wisatabanten-lama-banyak-parkir-liar>)

<https://www.tangerangekspres.co.id/2020/11/23/setelah-revitalisasi-banten-lama-tampilan-berubah-tapi-belum-tinggalkan-kebiasaan-lama/>.